



# LAPORAN TAHUNAN

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

# TAHUN 2014

*Accountability & Transparency*





## SAMBUTAN

### KETUA KOMITE KONSULTATIF KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Tahun 2014 ini merupakan tahun kelima berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekaligus merupakan tahun transisi terakhir penerapan SAP Berbasis *Cash Towards Accrual*. Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 diatur mengenai SAP Berbasis Akrual (Lampiran I) maupun SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (Lampiran II), hal ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk persiapan secara bertahap penerapan SAP Berbasis Akrual yang wajib diterapkan untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.



Pada tahun 2014, KSAP juga melaksanakan tugas-tugas terkait dengan Implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (*cash towards accrual*), seperti penyusunan beberapa buletin teknis beserta sosialisasinya kepada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2014 tersebut telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan KSAP 2014 ini, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya Presiden RI melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja KSAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan, dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2014 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Maret 2015

**Direktur Jenderal Perbendaharaan**

Selaku Ketua Komite Konsultatif,

  
Marwanto Harjowiryo

# PENGANTAR

## KETUA KOMITE KERJA

### KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Laporan Tahunan KSAP Tahun 2014 ini disusun sebagai media transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2014.

Disamping menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KSAP terus berupaya mendukung implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selama tahun 2014, selain menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan beberapa Buletin Teknis, KSAP juga melaksanakan tugas untuk ikut mendorong implementasi SAP dengan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, lokakarya (*workshop*), pelayanan publik, dan *helpdesk*. Selain itu KSAP juga memberikan konsultasi terhadap pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diterima KSAP terkait permasalahan dalam implementasi SAP baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Tahun 2014 ini, KSAP juga telah mengikuti sejumlah seminar yang bertujuan untuk memperkaya dalam proses penyusunan produk KSAP.

Dalam rangka mendukung implementasi SAP serta pengembangan SAP Berbasis Akrual, dan bahwa rencana strategis lima tahunan KSAP perlu diperbaharui, laporan tahunan KSAP tahun 2014 ini memuat rencana strategis lima tahunan KSAP tahun 2015 - 2019.

Dan guna meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, selain melaporkan seluruh kegiatan KSAP sepanjang Tahun 2014, Laporan Tahunan KSAP Tahun 2014 ini juga memuat informasi keuangan KSAP tahun 2014.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan agar dalam pelaksanaan kegiatan KSAP pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, Maret 2015

Ketua Komite Kerja

**Binsar H. Simanjuntak**



# Daftar Isi

Sambutan Ketua Komite Konsultatif	ii
Pengantar Ketua Komite Kerja	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
Organisasi dan Kedudukan KSAP	2
Tugas Pokok KSAP	3
Bab II Rencana Kerja KSAP Tahun 2014	4
Kondisi Umum	5
Rencana Strategis	6
Bab III Kinerja KSAP Tahun 2014	7
Capaian Kinerja	8
Pelaksanaan Kegiatan	9
Aspek Keuangan	10
Kendala dan Strategi Pemecahannya	11
Bab IV Rencana Strategis Tahun 2015-2019	12
Bab IV Rencana Kerja Tahun 2015	13
Bab V Penutup	

Rencana Kerja  
KSAP Tahun 2014

6

Kinerja KSAP

22

Rencana Startegis  
Tahun 2015-2019

26

Rencana Kerja  
KSAP Tahun 2015

30



## Daftar Tabel

Tabel 1 : Rencana Kerja KSAP Tahun 2010-2014	8
Tabel 2 : Daftar Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan	15
Tabel 3 : Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2014	17



# BAB I

## PENDAHULUAN



*doc. sekretariat 2014*

*Foto Bersama Ketua Komite Konsultatif Dan Komite Kerja 2014*

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana

diubah terakhir dengan Keppres Nomor 21 tahun 2013.

A. Organisasi dan Kedudukan KSAP KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 21 Tahun 2013 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan, mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan, dan proses penyusunan (*due process*) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi pemerintah, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya. Berikut susunan lengkap Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 21 Tahun 2013.

#### Komite Konsultatif:

1. **Direktur Jenderal Perbendaharaan,** Kementerian Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Direktur Jenderal Keuangan Daerah,** Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. **Direktur Jenderal Anggaran,** Kementerian Keuangan sebagai Anggota;
4. **Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia** sebagai Anggota;
5. **Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA** sebagai Anggota; dan
6. **Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa** sebagai Anggota.







### Komite Kerja

1. **Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA.** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Drs. AB Triharta, Ak., MM.** sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. **Sonny Loho, Ak., MPM., CA.** sebagai Sekretaris merangkap Anggota;



4. **Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA.** sebagai Anggota;
5. **Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA.** sebagai Anggota;
6. **Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA.** sebagai Anggota;



7. **Sumiyati, Ak., MFM.** sebagai Anggota;
8. **Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA.** sebagai Anggota;
9. **Drs. Hamdani, MM, Msi, Ak., CA.** sebagai Anggota

## B. Tugas Pokok KSAP

Berdasarkan Keppres Nomor 21 Tahun 2013, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Keppres No. 21 Tahun 2013, KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres tersebut, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP untuk perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja.

Kelompok Kerja periode tahun 2014 dibentuk berdasarkan KEP-6/K.1/KSAP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan beranggotakan 29 orang yang berasal dari berbagai lembaga.

### Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. **R. Wiwin Istanti, SE., Ak. M. LAWS.,** Ketua Merangkap Anggota;
2. **Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak.,** Wakil Ketua Merangkap Anggota;
3. **Moh. Hatta, Ak., MBA,** Anggota;
4. **Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc.,** Anggota;
5. **Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA,** Anggota;
6. **Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS.,** Anggota;
7. **Yulia Candra Kusumarini, S.Sos,** Anggota;
8. **Hasanuddin, Ak., M., Ak.,** Anggota;
9. **Syaiful, SE, Ak., MM,** Anggota;
10. **Hamim Mustofa, Ak.,** Anggota;
11. **Heru Novandi, SE, Ak.,** Anggota;
12. **Muliani Sulya F., SE,** Anggota;
13. **Zulfikar Aragani, SE.,** Anggota;
14. **Rahmat Mulyono, SE, Ak., M.Acc,** Anggota;
15. **Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM,** Anggota;
16. **Hari Sugiyanto, Ak. MSc.,** Anggota;
17. **Lucia Widiarsanti, SE, M.Si., CFE,** Anggota;
18. **Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA,** Anggota;
19. **Basuki Rahmat, SE,** Anggota;
20. **Jamason Sinaga, Ak., SIP.,** Anggota;
21. **Kadek Imam Eriksiawan M.Sc., Ak., M.Prof. Acc., BAP.,** Anggota;
22. **Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof. ACC.,** Anggota;
23. **Joni Afandi, SE., Ak., M.Si.,** Anggota;
24. **Toni Triyulianto, Ak., MPP.,** Anggota;
25. **Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA.,** Anggota;
26. **Budiman, SST., SE., MBA., Ak.,** Anggota;
27. **Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak.,** Anggota;
28. **Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak.,** Anggota; dan
29. **Erdhany Dwi Cahyadi, SE.,** Anggota.

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 8/KM.5/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. <b>Hari Sugiyanto</b>	Ketua
2. <b>Joko Supriyanto</b>	Wakil Ketua
3. <b>Zulfikar Aragani</b>	Anggota
4. <b>Basuki Rahmat</b>	Anggota
5. <b>Aldo Maulana A</b>	Anggota
6. <b>Wachid Ahyani</b>	Anggota
7. <b>Affifah Nurviana</b>	Anggota
8. <b>Khurul Syawal</b>	Anggota

### Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

# RENCANA KERJA 2014

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



doc. sekretariat 2014

*Audiensi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku ketua Komite Konsultatif*



Produk KSAP 2014

Buletin Teknis  
Standar Akuntansi Pemerintahan  
Nomor 15

### A. Kondisi Umum

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen, Pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Berdasarkan Keputusan Presiden, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP) yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan

pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Begitu pula Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk memenuhi amanat UU tersebut, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis ini disebut dengan basis kas menuju

akrual (*cash towards accrual*). SAP dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

Terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah dan DPR sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat banyak kendala sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun 2008. Hal ini mendasari kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 sesuai dengan kondisi dan kemampuan Indonesia.

Sebagai langkah awal untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual dan telah ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

Lingkup dari PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sementara SAP berbasis kas menuju akrual terdapat pada Lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual dengan batas waktu masa transisi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Rencana Strategis KSAP tahun 2010 – 2014 dan Rencana Strategis KSAP tahun 2015 – 2019, disusun sejalan dengan rencana pentahapan implementasi akuntansi berbasis akrual yang dicanangkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2012 dan 2013, fokus utama KSAP adalah penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) untuk melengkapi PSAP yang telah ada, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP merupakan penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

(PSAP) sebagaimana tertuang pada PP SAP. Sedangkan Buletin Teknis berisi informasi dan penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi para pengguna.

Tugas berikutnya dari KSAP pada periode 2013 – 2014 adalah membantu implementasi SAP baik pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. KSAP akan mendorong Pemerintah agar mempersiapkan implementasi akuntansi akrual dengan baik, sehingga pada tahun 2015 diharapkan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sudah menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

Pada Tahun 2015 – 2016 adalah masa awal implementasi SAP Berbasis Akrual. KSAP siap mendampingi pemerintah untuk mendukung kelancaran dan suksesnya implementasi Akuntansi Berbasis Akrual.

## B. Rencana Strategis

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

### Visi :

“Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas.”

### Misi :

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

**Tujuan:**

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi

dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Rencana kerja tersebut telah disesuaikan berdasarkan perkembangan yang terjadi selama tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 1. Rencana Kerja KSAP 2010-2014**

TAHUN 2010		
1	Penyusunan SAP Berbasis AkruaI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalisasi SAP Berbasis AkruaI</li> <li>2. Pembahasan dengan Sekretariat Negara untuk penerbitan PP SAP</li> <li>3. Penerbitan PP SAP Berbasis AkruaI</li> </ol>
2	Penyusunan Buletin Teknis SAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP CTA               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Aset Tetap</li> <li>• Buletin Teknis Bantuan Sosial</li> <li>• Buletin Teknis Hibah</li> <li>• Buletin Teknis Aset Tak Berwujud</li> <li>• Buletin Teknis Kas</li> <li>• Buletin Teknis Selisih Kurs</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> </ul> </li> <li>2. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP AkruaI               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> <li>• Buletin Teknis PNBK</li> </ul> </li> <li>3. Penerbitan buletin teknis SAP CTA               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Aset Tetap</li> </ul> </li> </ol>
3	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/<i>Workshop</i> PP SAP Berbasis AkruaI dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>3. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP</li> <li>4. Penyelenggaraan <i>Help Desk</i></li> <li>5. Pelayanan Publik</li> </ol>
4	International Events	Pertemuan <i>Governmental Accounting Standards Setters of ASEAN Member Countries</i>

TAHUN 2011		
1	Pengembangan SAP Berbasis Akrual	Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO
2	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penerbitan buletin teknis SAP CTA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Bantuan Sosial</li> <li>• Buletin Teknis Hibah</li> <li>• Buletin Teknis Aset Tak Berwujud</li> <li>• Buletin Teknis Kas</li> <li>• Buletin Teknis Selisih Kurs</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Negara Bukan Pajak</li> <li>• Buletin Teknis Akuntansi Penerusan Pinjaman</li> </ul>
3	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis CTA 2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 3. Pemeliharaan Website KSAP 4. Penyelenggaraan Help Desk 5. Pelayanan Publik

TAHUN 2012		
1	Pengembangan SAP Berbasis Akrual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO</li> <li>• Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Badan Layanan Umum</li> </ul>
2	Penyusunan Interpretasi PSAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Interpretasi PSAP tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah</li> <li>• Penyusunan IPSAP tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah</li> </ul>
3	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penyusunan buletin teknis SAP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buletin Teknis Hibah</li> <li>• Buletin Teknis Kas</li> <li>• Buletin Teknis Selisih Kurs</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan</li> <li>• Buletin Teknis Pendapatan Negara Bukan Pajak</li> </ul>
4	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis CTA 2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 3. Pemeliharaan Website KSAP 4. Penyelenggaraan Help Desk 5. Pelayanan Publik

TAHUN 2013		
1	Pengembangan SAP Berbasis Akrua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO</li> <li>• Penyusunan PSAP tentang Akuntansi BLU</li> <li>• Pengembangan SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>
2	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
3	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pelaksanaan Training of Trainers</li> <li>3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>4. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>5. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>6. Pelayanan Publik</li> </ol>

TAHUN 2014		
1	Pengembangan SAP Berbasis Akrua	Pengembangan SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
2	Penyusunan Buletin Teknis SAP	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akrua sesuai dengan kebutuhan
3	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis CTA</li> <li>2. Pelaksanaan Training of Trainers</li> <li>3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP</li> <li>4. Pemeliharaan Website KSAP</li> <li>5. Penyelenggaraan Help Desk</li> <li>6. Pelayanan Publik</li> </ol>

Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2014 sebagai berikut:

pertanggungjawaban keuangan negara. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya PSAP.

1. Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada tahun 2014 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Akrua (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. PSAP ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman terkait

2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP di Tahun 2014 ini merencanakan menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akrua (Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan para stakeholders. Buletin teknis ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman teknis penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.



### 3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

#### a. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

#### b. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis aktual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun di Indonesia. KSAP juga merencanakan mengirim para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

#### c. Pemeliharaan Website KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat website KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan output KSAP.

Agar website tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara website-nya.

#### d. Penyelenggaraan *Help Desk*

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkan SAP, KSAP membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.



Audiensi Komite Kerja KSAP dengan Direktur Jenderal Keuangan Daerah.



## BAB III

# KINERJA KSAP TAHUN 2014



*Suasana Rapat Pembahasan KSAP*

*doc. sekretariat 2014*



Produk KSAP 2014

Buletin Teknis  
Standar Akuntansi Pemerintahan  
Nomor 16

### A. Capaian Kinerja

Tahun 2014 merupakan tahun bagi KSAP untuk mensosialisasikan SAP Berbasis AkruaI melanjutkan sosialisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2011, selain itu tahun 2014 merupakan periode terakhir penerapan akuntansi berbasis kas menuju akruaI (PP 71/2010 lampiran II) sehingga fokus ke persiapan Implementasi SAP AkruaI menjadi sebuah keharusan. Dalam rangka Implementasi SAP AkruaI dimaksud KSAP didaulat untuk menyiapkan peraturan di bidang SAP dan turunannya, yaitu interpretasi SAP dan buletin teknis SAP.

Atas hal tersebut, pada Tahun 2014 KSAP menerbitkan Buletin Teknis, menyusun draft SAP, melakukan layanan publik berupa konsultasi permasalahan implementasi SAP serta sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dan kegiatan lainnya.

Ringkasan capaian kinerja KSAP pada tahun 2014 adalah:

1. Menetapkan 4 (empat) buletin teknis SAP.
2. Menetapkan 2 (dua) draf Final Pernyataan Standar.
3. Menyusun Draf Final Revisi PSAP Investasi.
4. Menyusun 7 (tujuh) draf buletin teknis.
5. Mendukung Sosialisasi SAP, sebagai narasumber pada beberapa Kementerian/ Lembaga, Pemda dan Perguruan Tinggi, dan
6. Melayani publik menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan akuntansi pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tahun 2014 tercatat kSAP telah menerima surat konsultasi implementasi SAP sebanyak 9 (sembilan) surat dan telah dijawab oleh KSAP di tahun 2014.

## B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam tahun 2014, KSAP telah menetapkan 4 (empat) buah buletin teknis yaitu:

- a. Buletin Teknis SAP No. 15 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI,
- b. Buletin Teknis SAP No. 16 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI
- c. Buletin Teknis SAP No. 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis AkruaI, dan
- d. Buletin Teknis SAP No. 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis AkruaI

Sehingga sampai dengan tahun 2014 KSAP telah mengeluarkan 18 buletin teknis SAP. Disamping itu, terdapat beberapa

buletin teknis yang dikembangkan, sampai akhir tahun 2014, sedang dalam proses pembahasan. Beberapa draf buletin teknis SAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buletin Teknis tentang Akuntansi Utang-AkruaI,
2. Buletin Teknis tentang Akuntansi Dana Bergulir-AkruaI,
3. Buletin Teknis tentang Akuntansi Bantuan Sosial-AkruaI,
4. Buletin Teknis tentang Akuntansi Kerugian Negara,
5. Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Non Pajak,
6. Buletin Teknis tentang Akuntansi Transfer, dan
7. Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak;

**Tabel 2 : Daftar Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan**

No.	Nomor Bultek	Tentang
1	Buletin Teknis Nomor 01	Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat
2	Buletin Teknis Nomor 02	Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah
3	Buletin Teknis Nomor 03	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi
4	Buletin Teknis Nomor 04	Penyajian dan Pengungkapan Belanja
5	Buletin Teknis Nomor 05	Akuntansi Penyusutan
6	Buletin Teknis Nomor 06	Akuntansi Piutang
7	Buletin Teknis Nomor 07	Akuntansi Dana Bergulir
8	Buletin Teknis Nomor 08	Akuntansi Utang
9	Buletin Teknis Nomor 09	Akuntansi Aset Tetap
10	Buletin Teknis Nomor 10	Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
11	Buletin Teknis Nomor 11	Akuntansi Aset Tidak Berwujud
12	Buletin Teknis Nomor 12	Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing
13	Buletin Teknis Nomor 13	Akuntansi Hibah
14	Buletin Teknis Nomor 14	Akuntansi Kas
15	Buletin Teknis Nomor 15	Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI
16	Buletin Teknis Nomor 16	Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI
17	Buletin Teknis Nomor 17	Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI;
18	Buletin Teknis Nomor 18	Akuntansi Penyusutan Berbasis AkruaI.

## 2. Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2014, KSAP telah menetapkan 2 (dua) draf Final Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah mendapat pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Surat ketua BPK Nomor 005/S/I-XII/09/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pertimbangan atas Rancangan PSAP tentang Penyajian LK BLU dan Pendaptan LO. Selanjutnya sesuai dengan *due process* kedua draf tersebut akan diproses penetapannya melalui Peraturan Menteri Keuangan. Kedua draf PSAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. PSAP tentang Pendapatan - LO; dan
2. PSAP tentang Akuntansi dan Pelaporan BLU.

3. Penyusunan Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam tahun 2014, KSAP telah mengembangkan Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Investasi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan PSAP tersebut dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum serta aturan dan mekanisme yang berlaku. Sampai dengan akhir Tahun 2014 draf tersebut dalam proses pembahasan final di dalam rapat pleno KSAP.

4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

### Kegiatan 1: Pemeliharaan *Website* KSAP

Dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah membangun Website KSAP dengan alamat: <http://www.ksap.org> yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan Website ditujukan untuk mengekspose seluruh produk yang dihasilkan KSAP, artiket-artikel, kegiatan

KSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung website. Pada Tahun 2014 telah dilakukan perbaikan tampilan Website KSAP tersebut.

### Kegiatan 2: Penyelenggaraan *Help Desk*

Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim helpdesk yang terdiri dari beberapa anggota Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya.

### Kegiatan 3: Pelayanan Publik

Pada tahun 2014, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi nara sumber tentang SAP. Selain itu, KSAP juga membantu memberikan konsultasi teknis atas implementasi SAP kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu:

1. Aktifitas Pendanaan dan Aktifitas Transitoris dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Penilaian Awal Aset Tetap dari Pemerintah Kabupaten Malinau;
3. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Tambahan Penghasilan bagi Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
5. Kebijakan Mengenai Barang Persediaan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
6. Perlakuan dan Kebijakan Akuntansi Aset terhadap Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam dari Dit. BMN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Koreksi terhadap Kesalahan Input Kode Kegiatan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Belitung Timur;

8. Perlakuan Akuntansi terhadap Nilai Residu dalam rangka Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
9. Penyajian Pendapatan dan Belanja Hibah/ Bantuan Sosial/Bantuan Operasional/ *Blockgrant* Berupa Uang atau Barang dalam Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

#### Kegiatan 4: Peningkatan Sumber Daya Manusia

Tahun 2014, KSAP mengirimkan Anggota untuk melakukan studi visit ke Australia atas undangan pemerintah Australia yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 30 Mei 2014. Tujuan studi visit KSAP yaitu *Australian*

*Department of Finance , Australian National Audit Office, dan Australian Accounting Standards Boards.*

#### C. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2014, KSAP mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp2.949.443.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSAP – Kementerian Keuangan Nomor DIPA-015.08.1.439165/2014 tanggal 5 Desember 2013. Dari anggaran tersebut, KSAP telah merealisasikan sebesar 93% dari pagu anggaran.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2014:

**Tabel 3 : Rincian dan Realisasi Belanja KSAP Tahun Anggaran 2014**

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	-	-	-
52	Belanja Barang	Rp 2.949.443.000	Rp 2.742.981.990	93%
53	Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 2.949.443.000</b>	<b>Rp 2.742.981.990</b>	<b>93%</b>

#### D. Lain-lain

Lain-lain 1: Ruang Sekretariat KSAP

Dalam rangka tugas dan fungsi KSAP yang semakin luas, semakin banyaknya kunjungan dari para pemangku kepentingan, dan adanya rencana pembentukan Direktur Eksekutif SAP, ruangan yang representatif dibutuhkan oleh KSAP.

Tahun 2014 ini dukungan fasilitasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa ruang kesekretariatan dan Ruang Rapat KSAP telah tersedia. Namun sarana dan prasarana masih perlu dilengkapi.

#### E. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Pada tahun 2014, terdapat beberapa buletin teknis yang direncanakan dapat diselesaikan dan diterbitkan namun sampai dengan akhir tahun 2014 target tersebut tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan KSAP memerlukan kajian yang lebih mendalam terhadap substansi buletin teknis yang cukup kompleks.





# BAB IV

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019



*Suasana Rapat Pembahasan KSAP*

*doc. sekretariat 2014*



Produk KSAP 2014

Buletin Teknis  
Standar Akuntansi Pemerintahan  
Nomor 17

Untuk mendukung implementasi SAP serta pengembangan SAP berbasis akrual pada tahun 2015, dan bahwa rencana strategis lima tahunan KSAP butuh diperbarui, maka berikut rencana strategis lima tahunan KSAP tahun 2015 sd. 2019.

### A. Latar Belakang

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Sebelum UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang fiskal, Menteri Keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004.

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005, kemudian untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013.

KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Keanggotaan KSAP berasal dari berbagai unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang mempunyai kompetensi akademik di bidang akuntansi sektor publik, register akuntan negara dan reputasi baik di bidang profesi akuntansi. Dalam bertugas KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (*accrual basis accounting*) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan tersebut dan dalam rangka menuju penerapan *accrual basis*

accounting, KSAP telah menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan standar akuntansi berbasis akrual pertama kali dan secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan: dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1) yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 21 Tahun 2013.

## C. Visi

KSAP memiliki misi sebagai berikut:

“Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang

akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas.”

#### D. Misi

Misi Utama KSAP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mampu memahami dan memanfaatkan informasi laporan keuangan pemerintah.

#### E. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya KSAP menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Independensi  
Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.
2. Universal  
Kami membangun Standar Akuntansi Pemerintahan bersikap objektif dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.
3. Profesionalisme  
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kode etik yang berlaku.
4. Demokratis  
Kami menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan.

#### F. Tujuan Strategis

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan menjaga independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### G. Sasaran Strategis

1. Tersedianya Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia yang dapat diterapkan oleh entitas Pelaporan dan memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
2. Tersedianya interpretasi dan pedoman akuntansi dan pelaporan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan.
3. Memberikan penjelasan atas perlakuan transaksi atau kejadian akuntansi yang belum diatur secara jelas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Terbangunnya kesamaan visi untuk peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah.
5. Meningkatkan ketaatan entitas pelaporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
6. Meningkatkan Profesionalisme anggota KSAP.
7. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi KSAP dengan para pemangku kepentingan.

## H. Kegiatan Strategis

1. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Penyusunan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan
5. Limited Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Public Hearing Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Training of Trainers/Workshop/Sosialisasi Awal PSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Permintaan Pertimbangan PSAP ke Badan Pemeriksa Keuangan
9. Pelayanan Publik (Diskusi/Narasumber)
10. Pengembangan Sumber Daya Manusia KSAP
11. Pemeliharaan Website KSAP
12. Penyelenggaraan Helpdesk KSAP
13. Komunikasi Publik
14. Audiensi dengan Komite Konsultatif dan atau Menteri Keuangan
15. Penyelenggaraan Kesekretariatan

Produk KSAP 2014  
Bunga Rampai  
Studi Kasus  
Akuntansi Pemerintahan  
Tahun 2014





# BAB V

## RENCANA KERJA TAHUN 2015



*Penyampaian produk KSAP oleh ketua komite kerja kepada wakil ketua komite konsultatif*



Produk KSAP 2014

Buletin Teknis  
Standar Akuntansi Pemerintahan  
Nomor 18

Sesuai dengan rencana strategis lima tahunan KSAP tahun 2015 sd. 2019, KSAP Tahun 2015 merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Penyusunan PSAP

Pada tahun 2015, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua, yaitu:

- a. PSAP Akuntansi Investasi (KSO, BOT, BTO, KPS),
- b. PSAP Akuntansi Aset Tak Berwujud
- c. PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
- d. PSAP Akuntansi dana untuk Entitas Non Pemerintah Penerima dana APBN/APBD
- e. PSAP Akuntansi Dana Desa
- f. PSAP Akuntansi Pengaturan Bersama (Joint Arrangement)

Disamping itu KSAP merencanakan menyusun PSAP lainnya yang dibutuhkan guna mendukung Implementasi SAP berbasis akrual Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### 2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2015, KSAP akan melakukan finalisasi penyusunan/penerbitan buletin teknis SAP Berbasis Akrua. Tujuan dari penyusunan buletin teknis adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang SAP Berbasis Akrua dalam menyusun laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

Buletin teknis SAP Berbasis Akrua yang akan diterbitkan adalah:

- 1 Buletin Teknis tentang Akuntansi Utang - Akrua,
- 2 Buletin Teknis tentang Akuntansi Dana Bergulir - Akrua,
- 3 Buletin Teknis tentang Akuntansi Bantuan Sosial - Akrua,
- 4 Buletin Teknis tentang Akuntansi Kerugian Negara,
- 5 Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Non Pajak,



- 6 Buletin Teknis tentang Akuntansi Transfer, dan
- 7 Buletin Teknis tentang Akuntansi Pendapatan Pajak

Pada tahun 2015, tidak menutup kemungkinan KSAP menyusun buletin teknis baru, di luar daftar di atas, yang dibutuhkan dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.

### **3. Sosialisasi, Public Hearing dan Limited Hearing SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrual**

Pada tahun 2015, KSAP direncanakan akan mengadakan sosialisasi mengenai SAP Berbasis Akrual dan buletin teknis baru SAP Berbasis Akrual. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2015, KSAP juga merencanakan mengadakan *Limited Hearing* serta *Public Hearing* mengenai Draf Bultek SAP Berbasis Akrual yang sedang dalam proses penyusunan.

### **4. Pengembangan SDM KSAP**

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirim para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

### **5. Pemeliharaan Website KSAP**

Sejak tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk

mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya. Para pengunjung dapat mendownload dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs [www.ksap.org](http://www.ksap.org).

### **6. Pemeliharaan Helpdesk**

Tim *Helpdesk* yang telah dibentuk akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2015. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question* (FAQ)/Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/ pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

### **7. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

### **8. Lain-lain**

Penyelenggaraan kesekretariatan berdaya optimal guna dukungan yang maksimal terhadap kinerja KSAP di tahun 2015. Penyempurnaan ruang rapat KSAP dengan kelengkapan fasilitasnya akan menjadi prioritas kesekretariatan di tahun 2015, disamping pemrosesan penetapan draf PSAP tentang Pendapatan - LO dan PSAP tentang Akuntansi dan Pelaporan BLU melalui mekanisme peraturan Menteri Keuangan.



## BAB VI PENUTUP

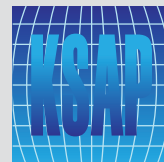


*Rapat Pleno dengan Komite Konsultatif*



Laporan Tahunan 2014 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

## LAPORAN TAHUNAN 2014



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
**Sekretariat :**  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2  
Jl. Budi Utomo No. 6  
Jakarta 10710 - Indonesia  
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551  
<http://www.ksap.org>  
e-mail : [webmaster@ksap.org](mailto:webmaster@ksap.org)  
[sekretariatsap@gmail.com](mailto:sekretariatsap@gmail.com)